

Daftar Pustaka/ References

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Buku

Andi Hamzah. (2011). *KUHP & KUHPA*. Edisi revisi. Penerbit: Rineka Cipta.

Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. (2019). *Modul Hukum Pembuktian*. Jakarta.

International Organization for Migration. (2017). *Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* . Jakarta.

Iskandar Zulkarnaen, (2015), *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta:Deepublish.

Paul SinlaEloE. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara press.

Perwita B dan Yani Y.M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya .

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Artikel Jurnal

Brian Septiadi, Eko Sopoyono. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

- Cahaya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono. (2014). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap perempuan dan anak suatu permasalahan dan penanganannya di kota Semarang*. Yustisia Edisi.
- Elsaida Hotmauli Siagian. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Gabriel Cuaca Navanya. (2020) . *Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) dalam Prespektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris*. Diponegoro Private Law Review.
- Karuniawati Ika Paramita. (2014). *Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah (mail order bride)*. Mimbar Keadilan ISSN: 0853 8964.
- M. Alvi Syahrin. (2019). *Polarisasi Penegakkan Hukum Keimigrasian Kontemporer : Aksiologi Normatif-Empiris*. Majalah Hukum Nasional Nomor 1.
- Made Dwi Kurnia Dananjaya A.A Sagung Laksmi Dewi. Luh Putu Suryani. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana Penganiayaan*. Jurnal Interpretasi Hukum Vol.1.
- Natalia Lisa Maringka. (2017). *Kajian Hukum terhadap aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lex Administratum Vol. V.

- Sabirin. (2017). *Perdagangan perempuan dengan dalih Perkawinan*. Raheema.
- Siti Sarah Maripah, (2016). *Fenomena Kawin Kontrak di kawasan Puncak Bogor*. Sosietas Vol.3.
- Sri Sutarwati. (2016). *Efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak pidana overstay Warga Negara Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Manajemen Dirgantara Vol.9.
- Syarif Hasyim Azizurrahman. (2017). *Pembaharuan kebijakan pidana kejahatan perdagangan orang (studi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat- Sarawak)*. Yustisia Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Udiyo Basuki. (2017). *Penegakkan Hukum atas Tindak Pidana perdagangan orang Perspektif Hak Asasi Manusia*. Varia Justicia.
- Wijers M & Lap-Chew, (1999), *Perdagangan Perempuan dalam Kerja Paksa dan Praktik praktik Seperti Perbudakan dalam Pernikahan, Rumah Tangga, dan Prostitusi*, Foundation Against Trafficking in Women The Netherlands.
- Yunus Ahyuni, (2020), *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Humanities Genius.

Internet

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporantahunan-perdagangan-orang-2020/>. Diakses tanggal 22 Desember 2020.

Widyaiswara Madya. Perkawinan Campuran (problematika dan solusi). Balai Diklat Keagamaan Palembang, diakses 22 Januari 2021 on-line <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERAWINANCAMPURANartikel.pdf>.